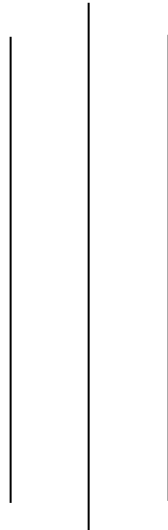




RENCANA STRATEGIS 2025-2029
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat 1 berbunyi “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (29), bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025-

2029 ini dibuat. Selama periode 5 tahun dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Sosial berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Sosial ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tabalong khususnya dibidang sosial.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tabalong. Rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dibidang sosial Kabupaten Tabalong untuk lima tahun mendatang yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang disertai tugas untuk melaksanakan kewajiban otonomi daerah dibidang Sosial, dibentuk

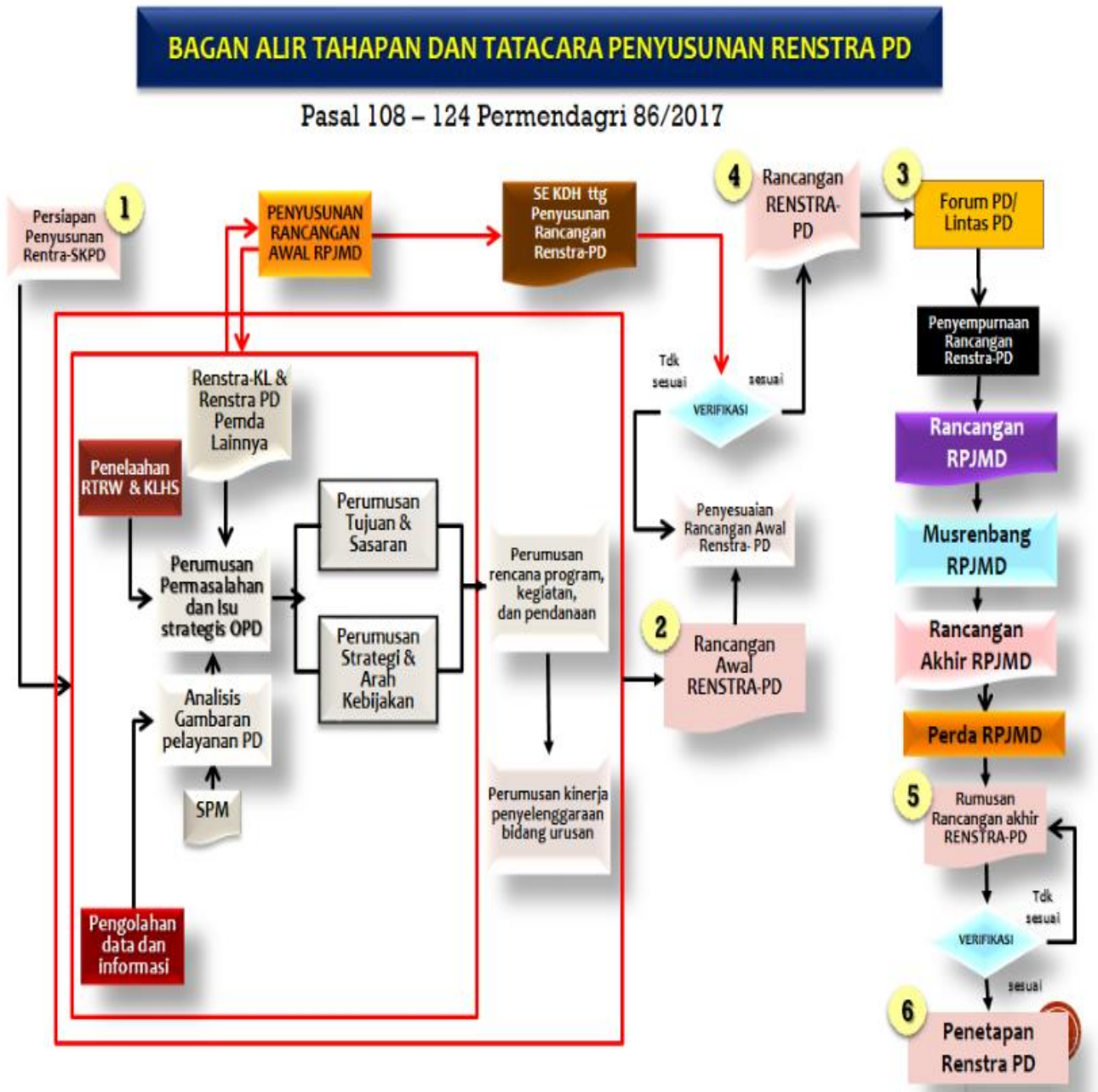
berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang demikian tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah melakukan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pelayanan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial mengalami berbagai tantangan dan hambatan sebagai akibat belum pulihnya perekonomian Indonesia dewasa ini. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan dan korban bencana (sosial maupun alam). Disamping itu globalisasi yang terjadi sebagai konsekwensi berlakunya AFTA 2003 telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang lebih bersifat pervasive yaitu perubahan besar yang dampaknya mempengaruhi segala aspek kehidupan dan terjadi secara berkelanjutan, tak terkecuali dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Dinas Sosial sebagai pelaksana pembangunan bidang sosial di Kabupaten Tabalong dihadapkan pada tantangan berat sebagai dampak dari perubahan tersebut. Untuk menghadapi tantangan yang ada, agar Dinas tetap survive. Dalam menghadapi setiap perubahan tersebut, maka pembenahan dan perbaikan terhadap sistem manajemen serta perubahan paradigma yang lebih adaptif dengan lingkungan mutlak diperlukan, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Adapun Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Sosial disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD

Permasalahan Sosial ini bukan saja merupakan masalah pada Dinas Sosial pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tabalong pada umumnya, akan tetapi sudah merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pemerintah dan swasta maupun instansi pemerintah secara terpadu.

Memperhatikan isi pembukaan UUD 1945 alinea IV terkandung cita-cita luhur bangsa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Alinea tersebut mengamanatkan bahwa negara hendak mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini mengamanatkan bahwa negara, yang dalam hal ini direpresentasikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu implementasi dari amanat ini adalah disusunnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memperkenalkan istilah penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong;
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pejabat di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari pembuatan Renstra SKPD adalah :

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Sosial Kabupaten Tabalong disusun berdasarkan dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Hal ini dimaksud sebagai landasan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan tercapainya visi, misi dan program yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dibidang Sosial pada 5 (lima) tahun kedepan.

- b. Tujuan :

1. Sebagai terjemahan praktis visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.
2. Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional SKPD.
3. Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan SKPD.

4. Sebagai instrument kontrol dan evaluasi pengelolaan SKPD dalam periode 5 (lima) tahun.
5. Sebagai penjabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025, maka naskah Rencana Strategis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial
- 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.6 Tantangan dan Peluang

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Dinas Sosial

4.2 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

4.3 Rencana Program dan Pendanaan

4.4 Daftar Sub. Kegiatan Prioritas

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

4.7 Tantangan dan Peluang

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kondisi Sosial Masyarakat Tabalong :

Masyarakat Kabupaten Tabalong secara umum berada dalam proses pembangunan sosial yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesejahteraan. Sebagai salah satu daerah penyangga di Kalimantan Selatan, dinamika sosial Tabalong dipengaruhi oleh urbanisasi, perubahan struktur ekonomi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas kesejahteraan sosial.

Di sisi lain, masih terdapat kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana sosial yang membutuhkan perhatian lebih. Kebutuhan layanan sosial menjadi semakin kompleks, bukan hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Permasalahan yang Dihadapi :

1. Keterbatasan Data Terpadu

Masih ditemui perbedaan data antara pusat dan daerah terkait jumlah dan kondisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), sehingga menyulitkan penentuan sasaran program yang tepat.

2. Kesenjangan Akses Layanan

Tidak semua masyarakat, terutama di wilayah terpencil, mendapatkan akses optimal terhadap layanan sosial karena keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM.

3. Ketergantungan pada Bantuan

Sebagian masyarakat penerima manfaat masih cenderung bergantung pada bantuan, belum sepenuhnya bertransformasi menuju kemandirian ekonomi dan sosial.

4. Tingginya Isu Sosial

Seperti masalah kemiskinan, pengangguran, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan pada kelompok rentan.

5. Kesiapsiagaan Bencana Sosial

Tabalong yang memiliki potensi banjir dan kebakaran hutan/lahan memerlukan sistem tanggap darurat sosial yang lebih cepat dan terintegrasi.

Isu Strategis Perangkat Daerah :

1. Penguatan Basis Data PPKS

Membangun data terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Sosial

Meningkatkan standar pelayanan publik bidang sosial, baik dari aspek sarana, prasarana, maupun kompetensi SDM perangkat daerah.

3. Pemberdayaan Masyarakat Rentan

Menggeser paradigma dari sekadar pemberian bantuan menuju penguatan kapasitas dan kemandirian sosial-ekonomi.

4. Kolaborasi Multipihak

Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

5. Kesiapan Menghadapi Dinamika Sosial

Termasuk mitigasi risiko bencana, penanganan konflik sosial, dan adaptasi terhadap perubahan sosial akibat perkembangan teknologi dan migrasi penduduk.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, maka Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah.

Unsur-unsur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial ;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
4. Melaksanakan administrasi dinas di bidang sosial ;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD ;
6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Unsur-Unsur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong yang kemudian dijelaskan melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pejabat dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dengan rincian tugas :

- a. Merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja pada Dinas Sosial berdasarkan visi misi kepala daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

- Daerah dibidang Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan penyusunan bahan Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban, dan segala bentuk pelaporan lainnya pada Dinas Sosial;
 - d. Memimpin, mengatur, membina, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Sosial;
 - e. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang Sosial;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial;
 - g. Mengevaluasi dan melaporkan hasil capaian kinerja lingkup Dinas Sosial dengan cara mengukur antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;
 - h. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - i. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - j. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris dengan rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan, mengkoordinasikan dan menyusun bahan rencana anggaran dan program kerja pada Sekretariat dan Dinas berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat meliputi Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian umum dan kepegawaian;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dibidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- f. Melaksanakan rencana program kerja lingkup penyusunan perencanaan, program, data, informasi, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang

- berkaitan dengan penyelenggaraan Perencanaan, Keuangan, umum dan Kepegawaian;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan Perencanaan, Keuangan, umum dan Kepegawaian;
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada Sekretariat dan Dinas;
 - j. Mengkoordinasikan dan mengolah penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada Sekretariat dan Dinas;
 - k. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang Sekretariat dan Dinas;
 - l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang Kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan dan umum dan Kepegawaian;
 - m. Melaksanakan dan menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas;

- n. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat, serta memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- o. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan lebih lanjut;
- p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- q. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- r. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbag Perencanaan dengan rincian :

- a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran subbagian perencanaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan

Anggaran, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya pada subbagian perencanaan dan keuangan;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada subbagian perencanaan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan dibidang perencanaan
- e. Menyiapkan dan menyampaikan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang perencanaan.
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Kepala Subbag Keuangan dengan rincian :

- a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran subbagian keuangan berdasarkan prioritas
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan dibidang dan keuangan;
- c. Menyiapkan dan menyampaikan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- e. Menyiapkan bahan data monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan pada subbagian keuangan;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan pembayaran gaji, upah dan tunjangan para pegawai;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan penelitian usulan permintaan biaya serta pembayaran uang perjalanan dinas;
- h. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan pelaporan pertanggungjawaban pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas, dan pindah pegawai;
- i. Menyiapkan bahan penerbitan SPM, penyusunan laporan keuangan realisasi belanja secara berkala, perhitungan realisasi belanja dan laporan keuangan akhir tahun anggaran;

- j. Menyiapkan dan mengerjakan pembukuan buku register SPM Giro, pengujian bukti belanja yang asli dan sah, pencatatan transaksi SPM Giro dalam buku jurnal pengeluaran kas, pencatatan transaksi SPM Giro dalam buku jurnal pengeluaran kas, SPJ pengeluaran kas;
- k. Mencatat, menyetor dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak;
- l. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan

5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan dan menyampaikan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang umum dan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;

- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, keamanan, rapat-rapat kedinasan serta pelayanan administrasi umum;
- f. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang asset dan inventaris barang milik daerah;
- h. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pengusulan penghapusan dan administrasi penatausahaan barang asset dan inventaris barang milik daerah;
- i. Menyiapkan bahan penyelesaian administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan program pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai, usulan kebutuhan diklat struktural/fungsional, usulan jabatan, penataan kebutuhan pegawai, pembinaan dan peningkatan disiplin, dan sistem informasi manajemen kepegawaian;

- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya;
- l. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- m. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- n. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga dan penanganan fakir miskin perkotaan dan perdesaan;
- c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- d. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya;
- h. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- i. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- j. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Pekerja sosial Ahli Muda

Pekerja Sosial berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis pekerjaan Sosial dalam pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi Pemerintah

Adapun rincian tugas dari Pekerja Sosial ahli muda adalah :

1. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. menganalisa materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
4. menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi;
5. mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;

8. menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
9. melaksanakan kontrak pelayanan antara Pekerja Sosial dengan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
11. menganalisa serta mengevaluasi kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
12. melaksanakan dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
13. menganalisa dan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program;
14. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;
15. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;
16. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan sosial;

17. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang perlindungan sosial;
18. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang penanganan fakir;
19. menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
20. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen evaluasi hasil intervensi;
21. melakukan kegiatan profesional pelayanan profesi Pekerja Sosial di masyarakat;

8. Penyuluh Sosial Ahli Muda

Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial kepada :

- a. PMKS;
- b. PSKS; dan/atau
- c. masyarakat.

Penyuluh Sosial dapat bekerja di instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota

9. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dengan rincian tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Mengkoordinasikan rumusan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. Mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial, anak, anak balita diluar panti dan/atau lembaga;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan/atau lembaga;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga;

- l. Mengkoordinasikan pengelolaan data pelayanan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- n. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara mengukur antara target dengan realisasi capaian berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan untuk bahan kebijakan selanjutnya;
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- p. Menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- q. Menyusun sasaran kerja pegawai dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

10 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dengan rincian tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

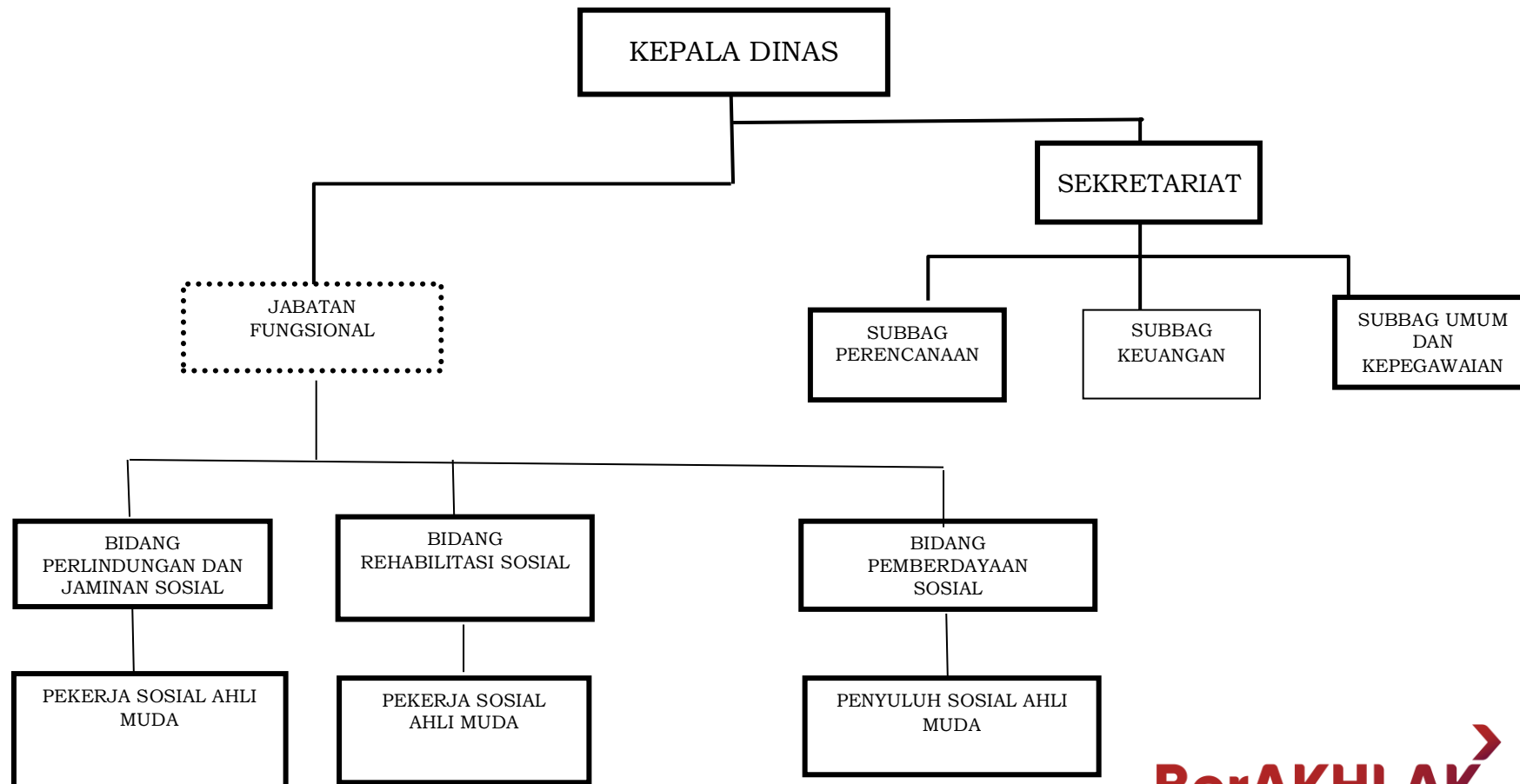
- b. Mengkoordinasikan rumusan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, maka susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri :
 1. Pekerja Sosial Ahli Muda
 2. Pekerja Sosial Ahli Muda
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri :
 1. Pekerja Sosial Ahli Muda
 2. Pekerja Sosial Ahli Muda
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
 1. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 2. Penyuluh Sosial Ahli Muda

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

Keberadaan sumber daya manusia Dinas Sosial sebagai salah satu pendukung utama dibidang pelayanan sosial yang dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai latar pendidikan yang berbeda, sebagai berikut :

Jumlah pegawai menurut Pangkat/golongan

No	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda/IV c	1	-	1
2.	Pembina Tk.I/IV b	1	-	1
3.	Pembina/IV a	1	-	1
4.	Penata Tk. I/III d	1	4	5
5.	Penata/III c		2	2
6.	Penata Muda Tk. I/III b	1	2	3
7.	Penata Muda/III a		2	2
8.	Pengatur Tk.I/II d	1	2	3
9.	Pengatur/II c	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tk.I/II b	-	-	-
11.	Pengatur Muda/II a	-	-	-
12.	Juru Tk.I/I d	1	-	1
13.	IX	3	10	13
14.	VII	1	-	1
15.	V	-	1	1
	Jumlah	11	23	44

Tabel 2.2
Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan					
		S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas	1		-	-	-	-
2.	Kesekretariatan	1	5	2	3	1	-
3.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	5	-	1	-	-
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial		5		-	-	-
5.	Bidang Pemberdayaan Sosial	1		1		-	-
	Jumlah	4	15	2	4	1	1

Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Sosial

No.	Daftar PSKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TKSK	12	12	12	12	12
2	PSM	40	40	40	40	40
3	Fasilitator SLRT	131	131	131	131	131
4	Front Office SLRT	1	1	1	1	1
5	Back Office SLRT	1	1	1	1	1
6	Tehnickal Asistans SLRT	1	1	1	1	1
7	Supervisor SLRT	2	2	2	2	2
8	Pendamping KAT	1	1	1	1	1
9	Pendamping Panti	2	2	2	2	2
10	Puskesmas	92	100	110	120	131

11	Karang Taruna	12	24	36	48	60
12	LKSA	10	12	12	12	12
13	Tagana	32	30	-	-	-
14	Pendamping PKH	32	29	-	-	-
	Jumlah	369	386	349	371	394

Daftar Aset Dinas Sosial

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
I	ALAT BESAR	1		
1	Pompa Air	1	buah	Baik
II	KOMPUTER	176		
1	P.C Unit	25	buah	Baik
2	Lap Top	59	buah	Baik
3	Note Book	1	buah	Baik
4	Monitor	6	buah	Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58	buah	Baik
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	buah	Baik
7	Peralatan Personal Komputer lainnya	20	buah	Baik
8	Wireless Access Point	1	buah	Baik
9	External/Portable Hardisk	1	buah	Baik
III	ALAT KESELAMATAN KERJA	3		
1	Tenda	3	buah	Baik
IV	PERALATAN OLAH RAGA	3		
1	Peralatan Permainan Lainnya	1	paket	Baik
2	Alat Tenis Meja	2		
V	ALAT ANGKUTAN	44		
1	Station Wagon	2	buah	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	buah	Baik
3	Pick Up	1	buah	Baik

4	Sepeda Motor	32	buah	Baik
5	Scooter	2	buah	Baik
6	Kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	6	buah	Baik
VI	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5		
1	Mesin Las Listrik	1	buah	Baik
2	Gergaji Chain Saw	1	buah	Baik
3	Dongkrak Hidrolik	1	buah	Baik
4	Mesin Bor Listrik Tangan	1	buah	Baik
5	Mesin Gerinda Tangan Listrik	1	buah	Baik
VII	ALAT PERTANIAN	1		
1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	buah	Baik
VIII	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	511		
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	buah	Baik
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	buah	Baik
3	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	1	buah	Baik
4	Lemari Besi/Metal	14	buah	Baik
5	Lemari Kayu	11	buah	Baik
6	Rak Besi	5	buah	Baik
7	Rak Kayu	9	buah	Baik
8	Filing Cabinet Besi	25	buah	Baik
9	Brandkas	1	buah	Baik
10	Lemari Kaca	10	buah	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	buah	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	1	buah	Baik
13	Papan Nama Instansi	3	buah	Baik
14	Papan Pengumuman	1	buah	Baik
15	Alat Kantor Lainnya	96	buah	Baik
16	Meja Kerja Kayu	15	buah	Baik
17	Meja Rapat	6	buah	Baik
18	Tempat Tidur Kayu	9	buah	Baik
19	Meja Panjang	1	buah	Baik
20	Kasur/Spring Bed	12	buah	Baik

21	Meja Makan Besi	4	buah	Baik
22	Kursi Rapat	30	buah	Baik
23	Kursi Tamu	3	buah	Baik
24	Kursi Putar	13	buah	Baik
25	Kursi Biasa	6	buah	Baik
26	Bangku Tunggu	4	buah	Baik
27	Meja Komputer	5	buah	Baik
28	Sofa	7	buah	Baik
29	Meubeleur lainnya	9	buah	Baik
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	buah	Baik
31	Mesin Pemetong Rumput	3	buah	Baik
32	Mesin Cuci	1	buah	Baik
33	Lemari Es	12	buah	Baik
34	A.C. Window	8	buah	Baik
35	A.C. Split	25	buah	Baik
36	Kipas Angin	11	buah	Baik
37	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	buah	Baik
38	Tabung Gas	1	buah	Baik
39	Treng Air/Tandon Air	4	buah	Baik
40	Rak Piring Aluminium	1	buah	Baik
41	Televisi	14	buah	Baik
42	Sound System	1	buah	Baik
43	Loudspeaker	1	buah	Baik
44	Wireless	4	buah	Baik
45	Mic Conference	1	buah	Baik
46	Camera film	16	buah	Baik
47	Tustel	5	buah	Baik
48	Mesin Jahit	4	buah	Baik
49	Tangga Aluminium	4	buah	Baik
50	Dispenser	5	buah	Baik
51	Karpet	4	buah	Baik
52	Gordyin/Kray	4	buah	Baik
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	buah	Baik
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	Baik

55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	20	buah	Baik
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	buah	Baik
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	Baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	buah	Baik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	buah	Baik
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	buah	Baik
61	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	buah	Baik
62	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	buah	Baik
IX	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	153		
1	Layar Film/Projector	2	buah	Baik
2	Telephone Mobile	137	buah	Baik
3	Handy Talky (HT)	10	buah	Baik
4	Alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	1	buah	Baik
5	Microphone/Wireless MIC	1	buah	Baik
6	Camera Conference	1	buah	Baik
7	Peralatan Antena shf/parabola lainnya	1	buah	Baik
X	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	55		
	Alat Kesehatan Umum lainnya	55	buah	Baik
XI	ALAT LABORATORIUM	1		
1	Mikroskop Dengan Camera	1	buah	Baik
XII	BAHAN PERPUSTAKAAN	4		
	Buku Umum Lain-Lain	1	buah	Baik
	Blue Print	3	buah	Baik
	Total	957	buah	Baik

Inventarisasi Tanah, Gedung dan Bangunan

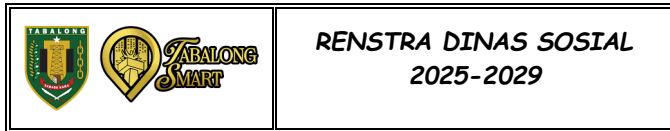
No	Nama Barang	Alamat	Luas (M ²)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Tanjung Selatan RT.07	100,00	

2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak	466,00	
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak		
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak	43,00	
5	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Jl. Tanjung Selatan RT.07	200,00	
6	Gedung Pos Jaga Permanen	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak	6,00	
7	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak		
8	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak	77.625,00	
9	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl. Tanjung Selatan Rt. 07		
10	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl. Tanjung Selatan RT.07		
11	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl. Tanjung Selatan RT.07	24,00	
12	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Jl. Tanjung Selatan RT.07		
13	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Jl.A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak		
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak		
15	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Jl. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec.Murung Pudak		
16	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	TMP Tanjung Kencana Mabu'un		
17	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Jl. Tanjung Selatan RT.07	36,00	

18	Tugu Pembangunan	Desa Dambung Kec. Bintang Ara	11,00	
19	Rumah Adat	Desa Dambung Kec. Bintang Ara	38,00	
20	Rumah Adat	Desa Undul Kec. Bintang Ara	36,00	
21	Makam Bersejarah	Jl. Mabu'un Kec. Murung Pudak		
22	Bangunan Menara Radio	Jl. Tanjung Selatan RT.07	20,00	
23	Pagar Permanen	Desa Mabu'un Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak		
24	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Ir.P.M. Noor Mabuun	1.000	
25	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Mabuun	7.001	
26	Tanah Kampung Lainnya	Jln Tanjung	2.665	

Inventarisasi Jalan, Jaringan Dan Irigasi

No	Nama Barang	Alamat	Keterangan
1	Jaringan Transmisi Lain-lain	Jl. Tanjung Selatan	
2	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s.d 20 KVA	Jln. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab.Tabalong	
3	Jaringan Distribusi Lain-lain	Jln.A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab.Tabalong	
4	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	Jln. A.Yani Trans Kaltim Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab.Tabalong	

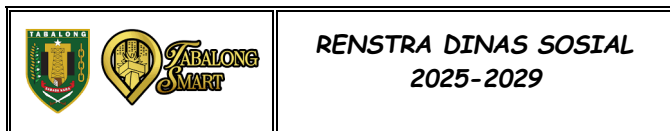


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

A. Capaian Kinerja

Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian indikator kinerja SKPD pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: (*Tabel terlampir*)



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		11.424		13.424	12.924	12.424	11.924	11.424	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis		750		150 20%	150 20%	150 20%	150 20%	150 20%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana Pelayanan kesejahteraan Sosial		15		10 58%	12 70%	14 82%	15 94%	15 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial		-																		
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial

Kelompok sasaran Dinas Sosial sangat beragam, ini mencakup individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami berbagai permasalahan kesejahteraan sosial.

Berikut adalah kelompok sasaran yang sering dilayani oleh Dinas Sosial, yaitu

a. Fakir Miskin

Yaitu Individu atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.

b. Anak Terlantar

Adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial karena suatu sebab tertentu yang menyebabkan orang tua tidak melaksanakan kewajibannya.

c. Lanjut Usia Terlantar

Adalah lanjut usia yang berumur 60 tahun atau lebih, yang karena faktor-faktor tertentu tidak mampu amemenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara fisik, rohani maupun sosialnya

d. Penyandang Disabilitas

Adalah individu yang mempunyai keterbatasan Fisik, mental maupun intelektual yang membutuhkan bantuan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

e. Korban Bencana

Adalah individu atau keluarga yang terdampak bencana alam atau bencana sosial, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, atau konflik.

f. Kelompok Rentan

Adalah individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan rentan terhadap bentuk diskriminasi, eksploitasi atau bahaya karena berbagai faktor.

2.5 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2029, dimana pada Bab II tentang kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta isu-isu strategis kondisi sosial budaya disebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan fenomena umum yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

Berkembangnya masalah sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam, dan gejala disintegrasi sosial, membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Kementerian Sosial memfokuskan pada 7 (tujuh) kelompok sasaran yaitu : Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Mereka termasuk sebagai penyandang masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian luar biasa mengingat mereka yang paling rentan terhadap berbagai perubahan baik secara ekonomi maupun sosial ditambah dengan situasi kebencanaan yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Ketujuh sasaran tersebut menyebar diberbagai pelosok daerah di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Masih rendahnya Kualitas	Belum	Data Pemerlu

hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapatkan pelayanan sosial	maksimalnya peran PSKS dan partisipasi lembaga swasta dalam penanganan PPKS	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum valid
---	---	--

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, ada 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tabalong berjumlah 25.531 PPKS. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong juga Dalam melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Sosial RI, sehingga rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019-2024 adalah salah satu dokumen penunjang dalam rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029.

Hal ini merupakan tantangan dan tanggungjawab Kementerian Sosial RI untuk dapat mewujudkan melalui berbagai program kegiatan terkait dengan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 yang semula 5 (lima) prioritas utama saat ini menjadi 7 (tujuh) prioritas utama yaitu kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan

penyimpangan perilaku; korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Di tingkat Nasional masalah penduduk miskin dan belum tuntasnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi isu penting dan tetap memerlukan perhatian dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Di tingkat Regional masalah *trafficking* dan perlindungan sosial merupakan permasalahan sosial yang mendapat perhatian serius pada beberapa negara. Di tingkat global masalah kemiskinan menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan.

Pada millennium ke 2 PBB melopori pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan tujuan pembangunan millennium yang dikenal dengan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang terdiri : 1. menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, 2. mencapai pendidikan dasar secara universal, 3. mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, 4. mengurangi tingkat kematian anak, 5. meningkatkan kesehatan ibu, 6. memerangi HIV AIDS, malaria dan penyakit lainnya, 7. menjamin keberlanjutan lingkungan, 8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dalam penyusunan renstra Dinas Sosial Kabupaten Tabalong ini juga mengkaji beberapa penelitian yang dilaksanakan pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI antara lain penelitian evaluasi pasca pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan fenomena umum yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten Tabalong. PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keteringgalan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah :

1. Masih rendahnya Kualitas hidup PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial
2. Belum maksimalnya peran PSKS dan partisipasi lembaga swasta dalam penanganan PPKS
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
4. Masih banyaknya warga miskin yang belum terdaftar di Basis Data Terpadu
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyebab bencana

Permasalahan PMKS ini mengacu pada rendahnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang perlu mendapatkan pelayanan sosial ini diantaranya keterlantaran, kemiskinan, kecacatan, bencana alam dan sosial serta ketunaan. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang belum mendapatkan pelayanan sebanyak 1.452 anak, lanjut usia terlantar sebanyak 423 orang, keluarga fakir miskin sebanyak 13.380 orang, anak balita cacat sebanyak 60 anak, penyandang cacat sebanyak 587 orang, bekas napi 16 orang, eks psikotik 34 orang, rumah tidak layak huni 570 buah, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 934 orang, KAT sebanyak 75 KK. korban bencana alam sebanyak 102 KK dan masyarakat yang tinggal di daerah bencana sebanyak 352 KK.

Untuk permasalahan rendahnya akses PPKS terhadap fasilitas publik terutama lembaga-lembaga pelatihan sosial ini dikarenakan tingkat kualitas hidup PPKS masih tergolong miskin, sehingga untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan sosial mengalami hambatan. Terutama bagi penyandang cacat karena ketidaktahuan masyarakat, mereka dibiarkan tinggal dirumah tanpa adanya keterampilan yang dimiliki sehingga tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga dengan anak-anak remaja yang putus sekolah serta wanita rawan sosial ekonomi rata-rata mereka tidak mengetahui adanya panti-panti sosial yang dapat memberikan pelatihan secara gratis.

Untuk kurangnya masalah sarana prasarana dalam menangani PPKS ini terutama penyandang cacat yang di rumah singgah sarana prasarana yang ada belum memadai, sehingga penyandang cacat potensial harus dikirim ke BBRSD dan BBRVB di Solo Jawa Tengah untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.

Sedangkan permasalahan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), masyarakat dan lembaga-lembaga swasta yang ada di Kabupaten Tabalong masih kurang hal ini dapat terlihat dari minimnya masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk memberikan informasi mengenai keberadaan PPKS yang ada di sekelilingnya atau terlibat secara langsung dalam menangani masalah PPKS.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Kementerian Sosial. Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Selain itu mencemati

isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program dinas selama lima tahun kedepan termasuk indikator penilaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah :
“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”. Visi ini mempunyai makna bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai Visi Presiden dan Wakil Presiden. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut yaitu dengan melaksanakan 7 (Tujuh) Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
4. Mewujudkan Sinergi pemerintah dalam kerangka negara dan Misi Presiden Selanjutnya.

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementerian Sosial, maka tujuan akhir penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya;
3. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, yaitu :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan, dan PPKS Lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019 melalui indikator :
 - 1.1 Persentase (%) Keluarga Miskin dan rentan serta PPKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
 - 1.2 Persentase (%) Anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui indikator :
 - 2.1 Persentase (%) SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya.
 - 2.2 Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya.

Untuk meningkatkan maksud dan tujuan dari rencana strategis pembangunan organisasi dan masyarakat maka perlu didukung dengan rencana yang matang, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.

Adapun program prioritas nasional serta Kementerian Sosial RI No. 30/HUK/2010 tentang Unit Percepatan dan Pengendalian Program Kementerian Sosial (UKP3KS) Tahun 2010.

Program Prioritas Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut :

1. Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Bantuan Pangan Non Tunai

Sedangkan program dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program prioritas Pembangunan Nasional Kementerian Sosial yaitu :

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
4. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

2. Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pd	Permasalahan Pd	Isu KIhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Kabupaten (Isu Rpjmd)	Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
<i>Pemberdayaan Sosial</i>	<i>Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran lansia, anak terlantar dan penyandang disabilitas</i>	<i>Kemiskinan</i>	<i>Perubahan Iklim</i>	<i>Dampak Perubahan Iklim, seperti peningkatan suhu, perubahan curah hujan dan peningkatan risiko bencana alam (banjir, kekeringan, kebakaran hutan) yang dapat berdampak langsung pada masyarakat.</i>	<i>Dampak Perubahan Iklim terhadap kelompok rentan, pengelolaan sampah dan limbah, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkelanjutan</i>	<i>Membangun sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera,</i>	<i>Belum Optimalnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah</i>
<i>Rehabilitasi Sosial</i>		<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>	<i>Polusi</i>	<i>Kelangkaan Sumber Daya Alam seperti air, lahan pertanian dan hutan, yang dapat menyebabkan konflik sosial dan kestabilan ekonomi.</i>		<i>Pengembangan Ekonomi yang inklusif dan berorientasi kerakyatan</i>	<i>Belum Tepatnya sasaran penjaminan perlindungan sosial</i>



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

<i>Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>		<i>Ketimpangan Sosial Ekonomi</i>	<i>Hilangnya Keanekaragaman hayati</i>	<i>Degradasi lingkungan, seperti pencemaran udara, air dan tanah yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan sosial.</i>		<i>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan</i>	
<i>Penanganan Fakir Miskin</i>		<i>Perubahan Sosial Akibat Pembangunan</i>				<i>Pengelolaan Sumber Daya alam yang lestari dan berkelanjutan</i>	
						<i>Peningkatan Infrastruktur</i>	
						<i>Ketahanan Bencana</i>	

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029 meliputi enam (6) hal utama :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera.
2. Pengembangan Ekonomi yang inklusif dan berorientasi kerakyatan
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Pengelolaan Sumber Daya alam yang lestari dan berkelanjutan
5. Peningkatan Infrastruktur
6. Ketahanan Bencana

Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan indentifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Adapun isu-isu strategis yang ada harus di hadapi oleh Dinas Sosial adalah :

1. Belum Optimalnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya Sasaran Penjaminan Perlindungan Sosial

Dinas Sosial mengambil beberapa langkah strategis dalam penanganan isu-isu penting perangkat daerah yaitu :

1. Penyusunan Renstra yang nantinya dapat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Evaluasi Kinerja
3. Analisis Kebutuhan Masyarakat
4. Koordinasi dan Kolaborasi
5. Pengembangan Program
6. Pembinaan dan Pengawasan

2.7 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial :

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu dengan adanya internalisasi SDGs ke dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan Komitmen Global dan Nasional dalam pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mendorong Perubahan berdasarkan prinsip dan hak asasi manusia serta memastikan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Ini mencakup tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan maksud untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan/kesenjangan di dalam dan antar negara. Tujuan utama SDGs adalah mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. SDGs terdiri dari 17 Tujuan yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Sesuai dengan 17 Tujuan dari SDGs tersebut, untuk Dinas Sosial Tujuan SDGs yang ingin dicapai adalah Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

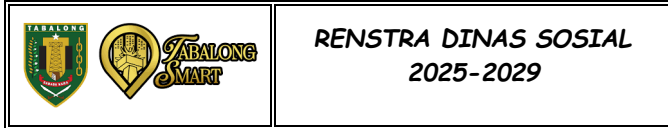
Adapun beberapa contoh kongkrit SDGs untuk tujuan 1 dan 10 diantaranya

2. Tanpa Kemiskinan

1. Program Bantuan Sosial seperti subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu.
2. Perberdayaan Ekonomi melalui pelatihan, akses modal, dan bantuan usaha kecil.

3. Mengurangi Ketimpangan/Kesenjangan

3. Pengembangan Program yang menargetkan masyarakat rentan, seperti Program Bantuan Sosial dan Pelatihan Keterampilan.



4. Peningkatan Akses terhadap layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan dan kesehatan.

Untuk melihat lebih lanjut tentang Internalisasi dari TPB/SDGs Dinas Sosial, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini

Tabel 2.7
Internalisasi SDGs Kedalam Dokumen Renstra Dinas Sosial

No	Indikator SDGs	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
1	1.1.1 Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Perlindungan dan Jaminan Sosial		
2	1.2.1 Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan Nasional, berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Perlindungan dan Jaminan Sosial		
3	1.2.2 Persentase Laki-Laki Perempuan, dan Anak-Anak Semua Usia Yang Hidup Dalam Kemiskinan Nasional dalam Berbagai Dimensi sesuai dengan Definisi Nasional	Perlindungan dan Jaminan Sosial		
4	1.3.1 Proporsi Penduduk Yang Menerima Program Perlindungan Sosial Menurut Jenis Kelamin, untuk Katergori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan,	Perlindungan dan Jaminan Sosial		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan

Adapun Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 adalah terpenuhinya layanan Kesejahteraan Sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dan implementasi dari tujuan pada tatanan yang lebih terarah, terperinci dan operasional. Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagai berikut

1. Meningkatnya Kualitas Hidup PPKS
2. Meningkatnya pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam masyarakat.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan

kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan indikator :

- '- Peningkatan akses terhadap layanan sosial, seperti warga miskin yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- '- Penyeleksian bantuan sosial yang tepat sasaran
- ,- Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan

3.3 Teknik merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

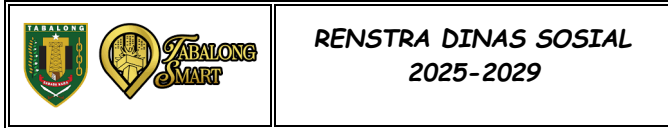
Rancangan program prioritas pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 menitikberatkan pada isu aktual seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, daya saing daerah, tatakelola pemerintahan/ reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemenuhan infrastruktur dasar mendukung IKN dan tatakelola lingkungan hidup.

Sasaran pokok strategis tahun 2025-2029, diantaranya meliputi;

- Menurunkan Angka Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia, yaitu melalui penguatan pendidikan, saint dan teknologi
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, bisa melalui swasembda pangan, energi, air, serta peningkatan tata kelola pemerintahan serta kualitas udara yang ramah lingkungan.
-

Dalam Menyusun Renstra terdapat Teknik atau Langkah sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran

1. Kita harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun



2. Kita harus menentukan sasaran agar dapat menentukan hasil yang lebih spesifik sebagai penjabaran dari tujuan.
4. Menentukan indikator sasaran agar kita dapat mengukur nilai kuantitatif atau kualitatif sebagai bentuk pencapaian sasaran .

Misalnya tujuannya adalah terpenuhinya layanan Kesejahteraan Sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), artinya Dinas Sosial ingin meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan sosial untuk Masyarakat. Untuk lebih jelasnya Teknik menentukan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL											
	Terpenuhinya layanan Kesejahteraan Sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Hidup PPKS	Persentase PPKS yang dilayani (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kepada Masyarakat	Persentase jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

Hendaknya Tujuan dan Sasaran tersebut mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan Pembangunan sesuai dengan RPJMD. Untuk mendukung maksud dan tujuan dari strategis pembangunan Kabupaten Tabalong maka perlu didukung dengan rencana yang matang, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang di cita-citakan dapat terwujud, salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.

3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Agar penyusunan Renstra menjadi lebih optimal dan terarah, perlu adanya penahapan-penahapan. Adapun pentahapan pada Renstra Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Persiapan	Penyusunan Rancangan Awal	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Rancangan Akhir	Penetapan

Elaborasi Tahapan :

- Tahap 1 Persiapan

Meliputi Pengumpulan Data, analisis situasi, dan isu-isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial

- Tahap 2 Penyusunan Rencana Awal

Merupakan Tahap awal Penyusunan Dokumen Renstra yang berisi tujuan, sasaran Strategi dan Program Kerja dengan memasukkan masukan dari berbagai pihak terkait, seperti perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat.

- Tahap 3 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum ini digunakan untuk membahas rancangan Renstra, memperoleh masukan, dan mencapai kesepakatan terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

- Tahap 4 Penyusunan Rancangan Akhir

Merupakan Tahap Akhir Penyusunan Renstra yang berisi kesepakatan terhadap hasil rancangan Renstra yang sudah dibahas pada forum pembahasan.

- Penetapan

Renstra Dinas Sosial ditetapkan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tergantung pada tingkat pemerintahannya.

3.5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah menguraikan kelemahan dan kekuatan melalui upaya peningkatan dan perbaikan, sehingga tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dibidang sosial.

Adapun Teknik untuk Merumuskan arah Kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi Nspk	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi masyarakat yang rentan, termasuk korban Bencana Alam, melalui bantuan sosial, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana	
2	Rehabilitasi Sosial	Mendorong kemajuan Daerah	Memperluas akses layanan rehabilitasi sosial Bagi Anak Terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis, dan kelompok rentan lainnya	
3	Pemberdayaan Sosial	Mengembangkan Kehidupan yang masyarakat religius	Memberdayakan Masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui program pemberdayaan sosial	
4	Penanganan Fakir Miskin	Menjadi Daerah yang terdepan	Mengurangi Kemiskinan melalui Program bantuan dan Pemberdayaan masyarakat miskin melalui sistem integrasi data DTKS, program pemberdayaan ekonomi serta kemitraan dengan lembaga kesejahteraan sosial	

Untuk merumuskan arah kebijakan Dinas Sosial memerlukan proses yang terstruktur dan berbasis data. Proses ini melibatkan beberapa teknik antara lain identifikasi masalah sosial, analisis data, penyusunan visi dan misi, penetapan target, serta pemetaan program dan kegiatan.

Adapun teknik yang dapat digunakan dalam merumuskan arah kebijakan Dinas Sosial adalah :

1. Identifikasi Masalah Sosial

- Penyusunan Profil Kesejahteraan Sosial

Yaitu melakukan survey dan analisis data untuk memahami kondisi kesejahteraan sosial di wilayah tersebut, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, akses layanan terhadap kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

- Penelitian dan Studi Kasus

Melakukan penelitian dan studi kasus tentang masalah sosial yang spesifik untuk memahami akar penyebab dan dampaknya

- Pengumpulan Data Dari Masyarakat

Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui forum, diskusi dan wawancara untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Analisis Data

- Pengolahan data
- Analisis SWOT
- Analisis Dampak

3. Penyusunan Visi dan Misi

4. Penetapan target

- Target Strategis
- Indikator Kinerja Utama

5. Pemetaan Program dan Kegiatan

- Identifikasi Program
- Penetapan Prioritas
- Penyusunan Rencana Kerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berdasarkan Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029, yaitu:

"TABALONG SMART (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai sebuah daerah yang tatanan masyarakatnya diarahkan kepada masyarakat madani yang beretika, bermoral, sejahtera dan mandiri.

1. Kabupaten Tabalong yang lebih Sejahtera

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

2. Kabupaten Tabalong yang lebih Maju

Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Kabupaten Tabalong yang lebih mandiri

3. Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

4. Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik

dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Penjabaran Visi ini dijabarkan dalam Misi Tabalong

2. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

- ✓ Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui Akses yang lebih baik terhadap Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial.
- ✓ Mendorong Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- ✓ Mengembangkan program-program yang mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat, termasuk Pemberdayaan UMKM dan Pertanian dalam arti luas.

2. Mendorong Kemajuan Daerah yang lebih maju

- ✓ Membangun Infrastruktur yang modern dan Mantap untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat.
- ✓ Memanfaatkan Teknologi dan Inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, serta pengembangan industri lokal.
- ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- ✓ Mengembangkan Kehidupan yang Religius

3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius

- ✓ Menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama.
- ✓ Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat.
- ✓ Mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan

4. Menjadi Daerah yang Terdepan

- ✓ Menjadi Pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah.
- ✓ Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Mengembangkan Potensi Lokal dan memperluas Jaringan Kerjasama, baik di Tingkat Regional maupun Nasional.
- ✓ Berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar dalam transparansi, Akuntabilitas, dan Responsivitas

Adapun Program Prioritas Bupati Dan Wakil Bupati Tabalong terdiri dari

7 (Tujuh) Program

1. **“Satu Desa Satu Wifi Gratis”**

Semua desa memiliki akses internet gratis, membuka pintu bagi Pendidikan, Informasi, dan peluang usaha di era digital.

2. **“Satu Desa Satu Da’i”**

Setiap desa akan memiliki satu Da'i, memperkuat nilai-nilai religius dan membentuk masyarakat yang lebih beradab dan harmonis, untuk membangun Tabalong SMART dan Berakhlak mulia.

3. “Tabalong Pasti Sehat”

Pelayanan Kesehatan mudah dijangkau oleh semua. Jaminan Kesehatan 100% dengan UHC, bantuan biaya bagi pendamping pasien, layanan sehat melalui home care, jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal.

4. “15 Ribu Tenaga Terampil”

Mengurangi pengangguran, mencetak tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan dan Pendidikan.

5. “1000 Beasiswa Sarjana”

Penyediaan 1.000 beasiswa bagi pemuda pemudi Tabalong agar bisa kuliah, memastikan tidak ada masyarakat miskin yang terhalang biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

6. “Jalan Dan Jembatan Mantap”

Meningkatkan dan memperbaiki seluruh jalan dan jembatan di Tabalong sehingga tidak ada lagi akses yang terputus. Jalan mulus, jembatan kokoh, akses lancar.

7. “Kredit Modal Untuk UMKM Dan Petani”

Dukungan penuh bagi UMKM dan petani dengan menyediakan kredit (bunga 0% tanpa biaya administrasi) agar mereka berkembang dan lebih produktif.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun rencana program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan pada Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Program Pemberdayaan Sosial
5. Program Kebencanaan
6. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan

4.1 PROGRAM DINAS SOSIAL

Untuk program dan Kegiatan yang ada di Dinas Sosial dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					53.288.378.912,00		57.660.690.100,00		62.391.749.500,00		67.510.992.200,00		73.050.268.900,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.020.874.846,00		14.089.237.600,00		15.245.259.500,00		16.496.133.000,00		17.849.640.700,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Berkategori nilai SAKIP A (%)	69	69	69	13.020.874.846,00	79	14.089.237.600,00	79	15.245.259.500,00	79	16.496.133.000,00	0	17.849.640.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					5.472.117.509,00		5.921.104.700,00		6.406.931.300,00		6.932.620.000,00		7.501.441.400,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100	100	5.472.117.509,00	100	5.921.104.700,00	100	6.406.931.300,00	100	6.932.620.000,00	100	7.501.441.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.463.800.000,00		5.912.104.700,00		6.397.192.800,00		6.922.082.400,00		7.490.039.200,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator	100	100	100	5.463.800.000,00	100	5.912.104.700,00	100	6.397.192.800,00	100	6.922.082.400,00	100	7.490.039.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

	SPM) (%)													
	Indeks Peranan Sosial (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	75	80	85		90		95		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					27.636.514.234,00		29.904.090.200,00		32.357.720.800,00		35.012.671.700,00		37.885.461.400,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Indeks)	70	80	90	27.636.514.234,00	100	29.904.090.200,00	100	32.357.720.800,00	100	35.012.671.700,00	100	37.885.461.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	80	90	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	

	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	70	80	90		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	70	80	90		95		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.379.357.685,00		1.492.533.900,00		1.614.996.300,00		1.747.506.700,00		1.890.889.600,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	75	78	79	1.379.357.685,00	80	1.492.533.900,00	80	1.614.996.300,00	85	1.747.506.700,00	87	1.890.889.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	70	75	80		85		90		95		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					315.714.638,00		341.619.000,00		369.648.800,00		399.978.400,00		432.796.600,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	315.714.638,00	100	341.619.000,00	100	369.648.800,00	100	399.978.400,00	100	432.796.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
TOTAL KESELURUHAN					53.288.378.912,00		57.660.690.100,00		62.391.749.500,00		67.510.992.200,00		73.050.268.900,00	

4.2. TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN

Adapun langkah-langkah teknis dalam merumuskan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dengan Tujuan/Sasaran OPD
2. Menentukan Program yang sesuai dengan tujuan OPD
3. Menurunkannya ke Kegiatan
4. Merincikan kegiatan tersebut ke dalam sub. Kegiatan
5. Menentukan indikator secara jelas dan terukur

Adapun Program tersebut merupakan payung besar, sedangkan kegiatan adalah strategi. Untuk sub. Kegiatan merupakan teknis pelaksanaan (aksi), sedangkan indikator merupakan alat ukuran keberhasilan

Rumusan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan pada Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL							
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan terkendalinya Ketimpangan	Terpenuhinya layanan Kesejahteraan Sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial		
		Meningkatnya Kualitas Hidup PPKS			Persentase PPKS yang dilayani		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Perangkat Daerah Berkategori nilai SAKIP A	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		

				Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan		Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				yang Disediakan			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01.0004 - Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	
Jumlah Lokasi yang telah dilakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	
Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Peranan Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

	Didata		
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenanga Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN <i>(01)</i>	TUJUAN <i>(02)</i>	SASARAN <i>(03)</i>	OUTCOME <i>(04)</i>	OUTPUT <i>(05)</i>	INDIKATOR <i>(06)</i>	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN <i>(07)</i>	KET <i>(08)</i>
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	1.06.06.2.02.0005 - Fasilitas Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
				Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
				Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1.06.06.2.02.0007 - Fasilitas Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
				Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

				Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Tabel 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				53.288.378.912,00		57.660.690.100,00		62.391.749.500,00		67.510.992.200,00		73.050.268.900,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.020.874.846,00		14.089.237.600,00		15.245.259.500,00		16.496.133.000,00		17.849.640.700,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Berkategori nilai SAKIP A	69	69	13.020.874.846,00	79	14.089.237.600,00	79	15.245.259.500,00	79	16.496.133.000,00	0	17.849.640.700,00	1.06.0.00.000.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		70.713.759,00		76.512.287,23		82.786.294,79		89.574.770,96		
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6	-	-	1	2.613.534,00	1	2.827.843,77	1	3.059.726,96	1	3.310.624,60		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		2.613.534,00		2.827.843,77		3.059.726,96		3.310.624,60		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6	-	-	1	2.613.534,00	1	2.827.843,77	1	3.059.726,96	1	3.310.624,60		
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1	2.511.044,00	1	2.716.949,61	1	2.939.739,48	1	3.180.798,11		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		2.511.044,00		2.716.949,61		2.939.739,48		3.180.798,11		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1	2.511.044,00	1	2.716.949,61	1	2.939.739,48	1	3.180.798,11		
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1	2.613.534,00	1	2.827.843,79	1	3.059.726,98	1	3.310.624,59		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-		2.613.534,00		2.827.843,79		3.059.726,98		3.310.624,59		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1	2.613.534,00	1	2.827.843,79	1	3.059.726,98	1	3.310.624,59		
Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	6	14.693.258,00	6	15.898.105,16	6	17.201.749,78	6	18.612.293,26		
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		14.693.258,00		15.898.105,16		17.201.749,78		18.612.293,26		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	6	14.693.258,00	6	15.898.105,16	6	17.201.749,78	6	18.612.293,26		
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1	2.511.044,00	1	2.716.949,61	1	2.939.739,48	1	3.180.798,11		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		2.511.044,00		2.716.949,61		2.939.739,48		3.180.798,11		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1	2.511.044,00	1	2.716.949,61	1	2.939.739,48	1	3.180.798,11		
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1	2.511.044,00	1	2.716.949,61	1	2.939.739,48	1	3.180.798,11		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		2.511.044,00		2.716.949,61		2.939.739,48		3.180.798,11		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1	2.511.044,00	1	2.716.949,61	1	2.939.739,48	1	3.180.798,11		
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	-	-	1	2.539.047,00	1	2.747.248,85	1	2.972.523,26	1	3.216.270,17		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		2.539.047,00		2.747.248,85		2.972.523,26		3.216.270,17		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1	2.539.047,00	1	2.747.248,85	1	2.972.523,26	1	3.216.270,17		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1	2.724.534,00	1	2.947.945,79	1	3.189.677,34	1	3.451.230,88		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		2.724.534,00		2.947.945,79		3.189.677,34		3.451.230,88		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	-	-	-	1	2.724.534,00	1	2.947.945,79	1	3.189.677,34	1	3.451.230,88		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	4	37.996.720,00	4	41.112.451,04	4	44.483.672,03	4	48.131.333,13		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		37.996.720,00		41.112.451,04		44.483.672,03		48.131.333,13		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	4	37.996.720,00	4	41.112.451,04	4	44.483.672,03	4	48.131.333,13		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.117.194.000,00		7.750.803.908,00		8.386.369.828,46		9.074.052.154,39		9.818.124.431,05
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	71	5.000.000,00	72	5.410.000,00	73	5.853.620,00	74	6.333.616,84		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00		5.410.000,00		5.853.620,00		6.333.616,84		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V	-	-	-	71	5.000.000,00	72	5.410.000,00	73	5.853.620,00	74	6.333.616,84		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	2	30.000.000,00	2	32.460.000,00	2	35.121.720,00	2	38.001.701,04		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		30.000.000,00		32.460.000,00		35.121.720,00		38.001.701,04		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	2	30.000.000,00	2	32.460.000,00	2	35.121.720,00	2	38.001.701,04		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	-	-	-	12	15.000.000,00	12	16.230.000,00	12	17.560.860,00	12	19.000.850,52		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD													
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				-		15.000.000,00		16.230.000,00		17.560.860,00		19.000.850,52		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	12	15.000.000,00	12	16.230.000,00	12	17.560.860,00	12	19.000.850,52		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	35	7.117.194.000,00	35	7.700.803.908,00	35	8.332.269.828,46	35	9.015.515.954,39	35	9.754.788.262,65		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.117.194.000,00		7.700.803.908,00		8.332.269.828,46		9.015.515.954,39		9.754.788.262,65		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	35	7.117.194.000,00	35	7.700.803.908,00	35	8.332.269.828,46	35	9.015.515.954,39	35	9.754.788.262,65		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39.375.000,00		603.603.750,00		653.099.257,50		706.653.396,62		764.598.975,14		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	4	11.000.000,00	4	11.902.000,00	4	12.877.964,00	4	13.933.957,05		
1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					-	11.000.000,00		11.902.000,00		12.877.964,00		13.933.957,05		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	4	11.000.000,00	4	11.902.000,00	4	12.877.964,00	4	13.933.957,05		
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	250	500.000.000,00	250	541.000.000,00	250	585.362.000,00	250	633.361.684,00		
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					-	500.000.000,00		541.000.000,00		585.362.000,00		633.361.684,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	250	500.000.000,00	250	541.000.000,00	250	585.362.000,00	250	633.361.684,00		
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	-	-	-	50	50.000.000,00	50	54.100.000,00	50	58.536.200,00	50	63.336.168,40		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Undangan													
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		50.000.000,00		54.100.000,00		58.536.200,00		63.336.168,40		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	50	50.000.000,00	50	54.100.000,00	50	58.536.200,00	50	63.336.168,40		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	35	39.375.000,00	35	42.603.750,00	35	46.097.257,50	35	49.877.232,62	35	53.967.165,69		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				39.375.000,00		42.603.750,00		46.097.257,50		49.877.232,62		53.967.165,69		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	35	39.375.000,00	35	42.603.750,00	35	46.097.257,50	35	49.877.232,62	35	53.967.165,69		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				683.384.460,00		739.421.985,72		798.737.784,21		864.234.282,51		935.101.493,68		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12	12	6.240.000,00	15	6.751.680,00	15	7.305.317,76	15	7.904.353,82	15	8.552.510,83		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Undangan yang Disediakan													
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.240.000,00		6.751.680,00		7.305.317,76		7.904.353,82		8.552.510,83		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	6.240.000,00	15	6.751.680,00	15	7.305.317,76	15	7.904.353,82	15	8.552.510,83		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	65	485.823.000,00	65	525.660.486,00	65	568.764.645,85	65	615.403.346,81	65	665.866.421,25		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				485.823.000,00		525.660.486,00		568.764.645,85		615.403.346,81		665.866.421,25		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	65	485.823.000,00	65	525.660.486,00	65	568.764.645,85	65	615.403.346,81	65	665.866.421,25		
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	20	55.447.276,00	10	59.993.952,63	10	64.913.456,75	10	70.236.360,20	10	75.995.741,74		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				55.447.276,00		59.993.952,63		64.913.456,75		70.236.360,20		75.995.741,74		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	20	55.447.276,00	10	59.993.952,63	10	64.913.456,75	10	70.236.360,20	10	75.995.741,74		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34	2	18.815.084,00	2	20.357.920,89	2	22.027.270,41	2	23.833.506,58	2	25.787.854,12		
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.815.084,00		20.357.920,89		22.027.270,41		23.833.506,58		25.787.854,12		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34	2	18.815.084,00	2	20.357.920,89	2	22.027.270,41	2	23.833.506,58	2	25.787.854,12		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	102.217.520,00	15	110.599.356,64	15	119.668.503,88	15	129.481.321,20	15	140.098.789,54		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				102.217.520,00		110.599.356,64		119.668.503,88		129.481.321,20		140.098.789,54		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	60	12	102.217.520,00	15	110.599.356,64	15	119.668.503,88	15	129.481.321,20	15	140.098.789,54		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	14.841.580,00	10	16.058.589,56	10	16.058.589,56	10	17.375.393,90	10	18.800.176,20		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.841.580,00		16.058.589,56		16.058.589,56		17.375.393,90		18.800.176,20		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	14.841.580,00	10	16.058.589,56	10	16.058.589,56	10	17.375.393,90	10	18.800.176,20		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.008.791.179,00		2.494.449.313,31		2.701.015.378,14		2.923.260.860,14		3.163.793.044,68		
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	-	-	35	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		150.000.000,00		-		-		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	-	-	35	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	yang Disediakan													
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1	2.792.825.000,00	-	1.260.773.907,63	-	1.548.978.589,20	-	2.399.691.454,50	-	2.617.790.947,78		
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.792.825.000,00		1.260.773.907,63		1.548.978.589,20		2.399.691.454,50		2.617.790.947,78		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1	2.792.825.000,00	-	1.260.773.907,63	-	1.548.978.589,20	-	2.399.691.454,50	-	2.617.790.947,78		
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	-	-	1	600.000.000,00	1	649.200.000,00	-	-	-	-		
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		600.000.000,00		649.200.000,00		-		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	5	-	-	1	600.000.000,00	1	649.200.000,00	-	-	-	-		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	5	215.966.179,00	2	233.675.405,68	2	252.836.788,94	2	273.569.405,64	2	296.002.096,90		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.966.179,00		233.675.405,68		252.836.788,94		273.569.405,64		296.002.096,90		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	5	215.966.179,00	2	233.675.405,68	2	252.836.788,94	2	273.569.405,64	2	296.002.096,90		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.053.818.455,00		1.140.231.568,31		1.233.730.556,91		1.334.896.462,58		1.444.357.972,51		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan	12	48	115.500.000,00	48	124.971.000,00	48	135.218.622,00	48	146.306.549,00	48	158.303.686,02		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.500.000,00		124.971.000,00		135.218.622,00		146.306.549,00		158.303.686,02		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	48	115.500.000,00	48	124.971.000,00	48	135.218.622,00	48	146.306.549,00	48	158.303.686,02		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	95		895.428.455,00	48	968.853.588,31	48	1.048.299.582,55	48	1.134.260.148,32	48	1.227.269.480,48		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				895.428.455,00		968.853.588,31		1.048.299.582,55		1.134.260.148,32		1.227.269.480,48		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	95		895.428.455,00	48	968.853.588,31	48	1.048.299.582,55	48	1.134.260.148,32	48	1.227.269.480,48		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24	37.890.000,00	24	40.996.980,00	24	44.358.732,36	24	47.996.148,41	24	51.931.832,58		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.890.000,00		40.996.980,00		44.358.732,36		47.996.148,41		51.931.832,58		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	24	37.890.000,00	24	40.996.980,00	24	44.358.732,36	24	47.996.148,41	24	51.931.832,58		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	5.000.000,00	8	5.410.000,00	8	5.853.620,00	8	6.333.616,85	8	6.852.973,43		
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.410.000,00		5.853.620,00		6.333.616,85		6.852.973,43		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	5.000.000,00	8	5.410.000,00	8	5.853.620,00	8	6.333.616,85	8	6.852.973,43		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.118.311.752,00		1.290.013.315,66		1.395.794.407,55		1.510.249.548,97		1.634.090.011,98		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	28	2	628.977.752,00	1	680.553.927,66	1	736.359.349,73	1	796.740.816,41	1	862.073.563,36		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				628.977.752,00		680.553.927,66		736.359.349,73		796.740.816,41		862.073.563,36		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	28	2	628.977.752,00	1	680.553.927,66	1	736.359.349,73	1	796.740.816,41	1	862.073.563,36		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	2	80.000.000,00	2	86.560.000,00	2	93.657.920,00	2	101.337.869,44		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		80.000.000,00		86.560.000,00		93.657.920,00		101.337.869,44		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	2	80.000.000,00	2	86.560.000,00	2	93.657.920,00	2	101.337.869,44		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	49	55	489.334.000,00	61	529.459.388,00	62	572.875.057,82	62	619.850.812,56	62	670.678.579,18		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				489.334.000,00		529.459.388,00		572.875.057,82		619.850.812,56		670.678.579,18		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	49	55	489.334.000,00	61	529.459.388,00	62	572.875.057,82	62	619.850.812,56	62	670.678.579,18		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				5.472.117.509,00		5.921.104.700,00		6.406.931.300,00		6.932.620.000,00		7.501.441.400,00		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100	100	5.472.117.509,00	100	5.921.104.700,00	100	6.406.931.300,00	100	6.932.620.000,00	100	7.501.441.400,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dalam Pelayanan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Sosial												
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100	100		100		100		100		100		
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				22.200.000,00		75.000.000,00		80.946.014,60		87.903.921,20		95.458.602,74	
Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	80	75.000.000,00	80	80.946.014,60	80	87.903.921,20	80	95.458.602,74	
1.06.02.2.01.0004 - Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang				-		75.000.000,00		80.946.014,60		87.903.921,20		95.458.602,74	



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

terpadu dan berkelanjutan														
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	80	75.000.000,00	80	80.946.014,60	80	87.903.921,20	80	95.458.602,74		
Jumlah Lokasi yang telah dilakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3	22.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.02.2.01.0005 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT				22.200.000,00		-		-		-		-		
Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3	22.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)			(11)
ota															
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				44.310.456,00		45.029.200,00		48.721.594,40		52.716.765,14		57.039.539,88			
Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3	2	44.310.456,00	12	45.029.200,00	20	48.721.594,40	24	52.716.765,14	24	57.039.539,88			
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				44.310.456,00		45.029.200,00		48.721.594,40		52.716.765,14		57.039.539,88			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3	2	44.310.456,00	12	45.029.200,00	20	48.721.594,40	24	52.716.765,14	24	57.039.539,88			



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	n Uang atau Barang													
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				5.405.607.053,00		5.801.075.500,00		6.277.263.691,00		6.791.999.313,66		7.348.943.257,38		
Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		-	-	-	95	55.000.000,00	100	59.510.000,00	105	64.389.820,00	105	69.669.785,24		
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial				-		55.000.000,00		59.510.000,00		64.389.820,00		69.669.785,24		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial		-	-	-	95	55.000.000,00	100	59.510.000,00	105	64.389.820,00	105	69.669.785,24		
Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	36	80.000.000,00	48	86.560.000,00	60	93.657.920,00	60	101.337.869,44		
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-		80.000.000,00		86.560.000,00		93.657.920,00		101.337.869,44		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	36	80.000.000,00	48	86.560.000,00	60	93.657.920,00	60	101.337.869,44		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	34	2	669.101.100,00	2	670.000.000,00	2	724.940.000,00	2	784.385.080,00	2	848.704.656,56		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				669.101.100,00		670.000.000,00		724.940.000,00		784.385.080,00		848.704.656,56		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	34	2	669.101.100,00	2	670.000.000,00	2	724.940.000,00	2	784.385.080,00	2	848.704.656,56		
Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-	38	687.788.878,00	38	690.000.000,00	38	746.580.000,00	38	807.799.560,00	38	874.039.123,92		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				687.788.878,00		690.000.000,00		746.580.000,00		807.799.560,00		874.039.123,92		
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-	38	687.788.878,00	38	690.000.000,00	38	746.580.000,00	38	807.799.560,00	38	874.039.123,92		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial	-	100	3.438.508.680,00	100	3.450.000.000,00	131	3.732.900.000,00	150	4.038.997.800,00	150	4.370.195.619,60		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	an Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya													
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				3.438.508.680,00		3.450.000.000,00		3.732.900.000,00		4.038.997.800,00		4.370.195.619,60		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	100	3.438.508.680,00	100	3.450.000.000,00	131	3.732.900.000,00	150	4.038.997.800,00	150	4.370.195.619,60		
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-	-	-	10	150.000.000,00	10	162.300.000,00	10	175.608.600,00	10	190.008.505,20		
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				-		150.000.000,00		162.300.000,00		175.608.600,00		190.008.505,20		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-	-	-	10	150.000.000,00	10	162.300.000,00	10	175.608.600,00	10	190.008.505,20		
Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-	36	160.046.000,00	50	169.000.000,00	75	182.858.000,00	131	197.852.356,00	131	214.076.249,19		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				160.046.000,00		169.000.000,00		182.858.000,00		197.852.356,00		214.076.249,19		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-	36	160.046.000,00	50	169.000.000,00	75	182.858.000,00	131	197.852.356,00	131	214.076.249,19		
Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	-	10	52.750.000,00	10	57.075.500,00	10	61.755.691,00	10	66.819.657,66	10	72.298.869,59		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	an Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota													
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				52.750.000,00		57.075.500,00		61.755.691,00		66.819.657,66		72.298.869,59		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10	52.750.000,00	10	57.075.500,00	10	61.755.691,00	10	66.819.657,66	10	72.298.869,59		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-	-	-	15	80.000.000,00	17	86.560.000,00	20	93.657.920,00	20	101.337.869,44		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					-	80.000.000,00		86.560.000,00		93.657.920,00		101.337.869,44		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-	-	-	15	80.000.000,00	17	86.560.000,00	20	93.657.920,00	20	101.337.869,44		
Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-	30	397.412.395,00	30	400.000.000,00	30	433.300.000,00	30	468.830.600,00	30	507.274.709,20		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.02.2.03.0010 - Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				397.412.395,00		400.000.000,00		433.300.000,00		468.830.600,00		507.274.709,20		
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/ Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-	30	397.412.395,00	30	400.000.000,00	30	433.300.000,00	30	468.830.600,00	30	507.274.709,20		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				5.463.800.000,00		5.912.104.700,00		6.397.192.800,00		6.922.082.400,00		7.490.039.200,00		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	70	80	5.463.800.000,00	85	5.912.104.700,00	90	6.397.192.800,00	95	6.922.082.400,00	100	7.490.039.200,00	1.06.000.000.01.000 - DINAS SOSIAL	
	Indeks Peranan Sosial	70	80		85		90		95		100			
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100	100		100		100		100		100			



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	dasarnya di luar panti (Indikator SPM)													
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	70	80		85		90		95		100			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	75	85		90		95		100		100			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				4.614.366.425,00		4.983.017.571,85		5.391.920.527,34		5.834.377.800,98		6.313.142.823,86		
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		30	47.000.000,00	30	50.854.000,00	30	55.024.028,00	30	59.535.998,30	30	64.417.950,16		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				47.000.000,00		50.854.000,00		55.024.028,00		59.535.998,30		64.417.950,16		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		30	47.000.000,00	30	50.854.000,00	30	55.024.028,00	30	59.535.998,30	30	64.417.950,16		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	31	190.500.000,00	35	206.121.000,00	40	223.022.922,00	45	241.310.801,60	50	261.098.287,34		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				190.500.000,00		206.121.000,00		223.022.922,00		241.310.801,60		261.098.287,34		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	31	190.500.000,00	35	206.121.000,00	40	223.022.922,00	45	241.310.801,60	50	261.098.287,34		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	-	102	254.625.907,00	108	265.500.000,00	112	287.271.000,00	120	310.827.222,00	135	336.315.054,20		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota													
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				254.625.907,00		265.500.000,00		287.271.000,00		310.827.222,00		336.315.054,20		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	102	254.625.907,00	108	265.500.000,00	112	287.271.000,00	120	310.827.222,00	135	336.315.054,20		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	10.600.000,00	30	11.469.200,00	30	12.409.674,40	30	13.427.267,70	30	14.528.303,65		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				10.600.000,00		11.469.200,00		12.409.674,40		13.427.267,70		14.528.303,65		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	10.600.000,00	30	11.469.200,00	30	12.409.674,40	30	13.427.267,70	30	14.528.303,65		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	50.600.000,00	30	54.749.200,00	30	59.238.634,40	30	64.096.202,42	30	69.352.091,02		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				50.600.000,00		54.749.200,00		59.238.634,40		64.096.202,42		69.352.091,02		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	50.600.000,00	30	54.749.200,00	30	59.238.634,40	30	64.096.202,42	30	69.352.091,02		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	9.285.000,00	30	10.046.370,00	30	10.870.172,34	30	11.761.526,47	30	12.725.971,64		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				9.285.000,00		10.046.370,00		10.870.172,34		11.761.526,47		12.725.971,64		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	9.285.000,00	30	10.046.370,00	30	10.870.172,34	30	11.761.526,47	30	12.725.971,64		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	13	12.785.000,00	15	13.833.370,00	20	15.263.220,94	23	16.514.805,06	30	17.869.019,07		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.785.000,00		13.833.370,00		15.263.220,94		16.514.805,06		17.869.019,07		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	-	13	12.785.000,00	15	13.833.370,00	20	15.263.220,94	23	16.514.805,06	30	17.869.019,07		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		50	4.800.000,00	50	5.193.600,00	50	5.619.475,20	50	6.080.272,17	50	6.578.854,48		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				4.800.000,00		5.193.600,00		5.619.475,20		6.080.272,17		6.578.854,48		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		50	4.800.000,00	50	5.193.600,00	50	5.619.475,20	50	6.080.272,17	50	6.578.854,48		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	-	1600	655.710.680,00	1600	675.550.000,00	1600	730.945.100,00	1600	790.882.598,19	1600	855.734.971,25		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota													
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				655.710.680,00		675.550.000,00		730.945.100,00		790.882.598,19		855.734.971,25		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1600	655.710.680,00	1600	675.550.000,00	1600	730.945.100,00	1600	790.882.598,19	1600	855.734.971,25		
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25	6.972.718,00	25	75.440.000,00	25	81.626.080,00	25	88.639.208,96	25	96.253.667,29		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				6.972.718,00		75.440.000,00		81.626.080,00		88.639.208,96		96.253.667,29		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	-	25	6.972.718,00	25	75.440.000,00	25	81.626.080,00	25	88.639.208,96	25	96.253.667,29		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota													
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	25	6.000.000,00	25	6.492.000,00	25	7.024.344,00	25	7.600.340,21	25	8.223.568,11			
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			6.000.000,00		6.492.000,00		7.024.344,00		7.600.340,21		8.223.568,11			
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,	25	6.000.000,00	25	6.492.000,00	25	7.024.344,00	25	7.600.340,21	25	8.223.568,11			



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota													
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5	6.500.000,00	7	7.033.000,00	9	7.609.706,00	11	8.233.701,89	15	8.908.865,45		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				6.500.000,00		7.033.000,00		7.609.706,00		8.233.701,89		8.908.865,45		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5	6.500.000,00	7	7.033.000,00	9	7.609.706,00	11	8.233.701,89	15	8.908.865,45		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

<p>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	-	100	3.358.987.120,00	100	3.600.735.831,85	100	3.895.996.170,06	100	4.215.467.856,01	100	4.561.136.220,20		
<p>1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p>				3.358.987.120,00		3.600.735.831,85		3.895.996.170,06		4.215.467.856,01		4.561.136.220,20		
<p>Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p>	-	100	3.358.987.120,00	100	3.600.735.831,85	100	3.895.996.170,06	100	4.215.467.856,01	100	4.561.136.220,20		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	Kewenangan Kabupaten/Kota													
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				849.433.575,00		929.087.128,15		1.005.272.272,66		1.087.704.599,02		1.176.896.376,14		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		-	12	849.433.575,00	12	919.087.128,15	12	994.452.272,66	12	1.075.997.359,02	12	1.164.229.142,46		
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				849.433.575,00		919.087.128,15		994.452.272,66		1.075.997.359,02		1.164.229.142,46		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		-	12	849.433.575,00	12	919.087.128,15	12	994.452.272,66	12	1.075.997.359,02	12	1.164.229.142,46		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

<p>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	-	-	-	100	10.000.000,00	100	10.820.000,00	100	11.707.240,00	100	12.667.233,68		
<p>1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA</p>				-		10.000.000,00		10.820.000,00		11.707.240,00		12.667.233,68		
<p>Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan</p>	-	-	-	100	10.000.000,00	100	10.820.000,00	100	11.707.240,00	100	12.667.233,68		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETERANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
	Kabupaten/Kota													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				27.636.514.234,00		29.904.090.200,00		32.357.720.800,00		35.012.671.700,00		37.885.461.400,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	70	80	27.636.514.234,00	85	29.904.090.200,00	90	32.357.720.800,00	95	35.012.671.700,00	100	37.885.461.400,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	dan Pendataan Data Fakir Miskin													
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	70	90		100		100		100		100			
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	70	90		95		100		100		100			
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				5.514.620.000,00		5.968.200.638,00		6.459.088.293,92		6.990.351.328,42		7.565.310.757,95		
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	510	510	5.514.620.000,00	600	5.968.200.638,00	600	6.459.088.293,92	600	6.990.351.328,42	600	7.565.310.757,95		
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				5.514.620.000,00		5.968.200.638,00		6.459.088.293,92		6.990.351.328,42		7.565.310.757,95		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	510	510	5.514.620.000,00	600	5.968.200.638,00	600	6.459.088.293,92	600	6.990.351.328,42	600	7.565.310.757,95		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				22.121.894.234,00		23.935.889.562,00		25.898.632.506,08		28.022.320.371,58		30.320.150.642,05		
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15000	15000	396.493.600,00	15000	429.006.000,00	15000	464.184.492,00	15000	502.247.620,34	15000	543.431.925,21		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				396.493.600,00		429.006.000,00		464.184.492,00		502.247.620,34		543.431.925,21		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15000	15000	396.493.600,00	15000	429.006.000,00	15000	464.184.492,00	15000	502.247.620,34	15000	543.431.925,21		
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	15000	18.913.120.000,00	16000	20.463.995.840,00	16000	22.142.043.498,88	16000	23.957.691.065,79	16000	25.922.221.733,18		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				18.913.120.000,00		20.463.995.840,00		22.142.043.498,88		23.957.691.065,79		25.922.221.733,18		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	15000	18.913.120.000,00	16000	20.463.995.840,00	16000	22.142.043.498,88	16000	23.957.691.065,79	16000	25.922.221.733,18		
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	120	2.260.461.200,00	120	2.445.819.018,40	120	2.646.376.177,90	120	2.863.379.024,50	120	3.098.176.104,51		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	ota													
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				2.260.461.200,00		2.445.819.018,40		2.646.376.177,90		2.863.379.024,50		3.098.176.104,51		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	120	2.260.461.200,00	120	2.445.819.018,40	120	2.646.376.177,90	120	2.863.379.024,50	120	3.098.176.104,51		
Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12	12	551.819.434,00	12	597.068.703,60	12	646.028.337,30	12	699.002.660,95	12	756.320.879,15		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				551.819.434,00		597.068.703,60		646.028.337,30		699.002.660,95		756.320.879,15		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi	12	12	551.819.434,00	12	597.068.703,60	12	646.028.337,30	12	699.002.660,95	12	756.320.879,15		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

	dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan													
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.379.357.685,00		1.492.533.900,00		1.614.996.300,00		1.747.506.700,00		1.890.889.600,00		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	75	79	1.379.357.685,00	80	1.492.533.900,00	80	1.614.996.300,00	85	1.747.506.700,00	87	1.890.889.600,00	1.06.000.0001.0000 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	70	80		85		90		95		100			
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100	100		100		100		100		100			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				441.019.165,00		451.789.765,60		488.911.146,58		529.082.564,00		572.554.684,85		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70	1000	177.275.050,00	1000	181.275.050,00	1000	196.139.604,10	1000	212.223.051,64	1000	229.625.341,87		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				177.275.050,00		181.275.050,00		196.139.604,10		212.223.051,64		229.625.341,87		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70	1000	177.275.050,00	1000	181.275.050,00	1000	196.139.604,10	1000	212.223.051,64	1000	229.625.341,87		
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	-	50	23.750.000,00	100	25.697.500,00	100	27.804.695,00	100	30.084.679,99	100	32.551.623,75		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				23.750.000,00		25.697.500,00		27.804.695,00		30.084.679,99		32.551.623,75		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50	23.750.000,00	100	25.697.500,00	100	27.804.695,00	100	30.084.679,99	100	32.551.623,75			
Jumlah Orang yang Mendapatkan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	43.618.115,00	30	44.618.115,00	30	48.276.800,43	30	52.235.498,07	30	56.518.808,91			
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				43.618.115,00		44.618.115,00		48.276.800,43		52.235.498,07		56.518.808,91			
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30	43.618.115,00	30	44.618.115,00	30	48.276.800,43	30	52.235.498,07	30	56.518.808,91			



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

OUTPUT			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenanga Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	5000	121.776.000,00	5000	125.199.100,60	5000	135.540.047,05	5000	146.735.034,30	5000	158.854.657,72		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				121.776.000,00		125.199.100,60		135.540.047,05		146.735.034,30		158.854.657,72		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	5000	121.776.000,00	5000	125.199.100,60	5000	135.540.047,05	5000	146.735.034,30	5000	158.854.657,72		
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	74.600.000,00	1	75.000.000,00	1	81.150.000,00	1	87.804.300,00	1	95.004.252,60		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				74.600.000,00		75.000.000,00		81.150.000,00		87.804.300,00		95.004.252,60		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	74.600.000,00	1	75.000.000,00	1	81.150.000,00	1	87.804.300,00	1	95.004.252,60		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				938.338.520,00		1.040.744.134,40		1.126.085.153,42		1.218.424.136,00		1.318.334.915,15		
Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana		250	41.299.200,00	250	44.685.734,40	250	48.349.964,62	250	52.314.661,72	250	56.604.463,98		
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				41.299.200,00		44.685.734,40		48.349.964,62		52.314.661,72		56.604.463,98		
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana		250	41.299.200,00	250	44.685.734,40	250	48.349.964,62	250	52.314.661,72	250	56.604.463,98		
Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi		3	162.000.000,00	3	169.000.000,00	3	182.858.000,00	3	197.852.356,00	3	214.076.249,19		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.06.2.02.0005 - Fasilitas Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana				162.000.000,00		169.000.000,00		182.858.000,00		197.852.356,00		214.076.249,19		
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi		3	162.000.000,00	3	169.000.000,00	3	182.858.000,00	3	197.852.356,00	3	214.076.249,19		
Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksana kan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/K ota	3	3	34.598.400,00	3	35.598.400,00	3	38.517.468,80	3	41.675.901,24	3	45.093.325,14		
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				34.598.400,00		35.598.400,00		38.517.468,80		41.675.901,24		45.093.325,14		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksana kan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/K ota	3	3	34.598.400,00	3	35.598.400,00	3	38.517.468,80	3	41.675.901,24	3	45.093.325,14		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai		50	30.000.000,00	50	32.460.000,00	50	35.121.720,00	50	38.001.701,04	50	41.117.840,53		
1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana				30.000.000,00		32.460.000,00		35.121.720,00		38.001.701,04		41.117.840,53		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai		50	30.000.000,00	50	32.460.000,00	50	35.121.720,00	50	38.001.701,04	50	41.117.840,53		
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	25	470.790.920,00	25	479.000.000,00	25	518.278.000,00	25	560.776.796,00	25	606.760.493,27		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				470.790.920,00		479.000.000,00		518.278.000,00		560.776.796,00		606.760.493,27		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	25	470.790.920,00	25	479.000.000,00	25	518.278.000,00	25	560.776.796,00	25	606.760.493,27		
Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	20	199.650.000,00	20	200.000.000,00	20	216.400.000,00	20	234.144.800,00	20	253.344.673,60		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				199.650.000,00		200.000.000,00		216.400.000,00		234.144.800,00		253.344.673,60		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	20	199.650.000,00	20	200.000.000,00	20	216.400.000,00	20	234.144.800,00	20	253.344.673,60		
Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-	-	-	30	80.000.000,00	30	86.560.000,00	30	93.657.920,00	30	101.337.869,44		



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				-		80.000.000,00		86.560.000,00		93.657.920,00		101.337.869,44		
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-	-	-	30	80.000.000,00	30	86.560.000,00	30	93.657.920,00	30	101.337.869,44		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				315.714.638,00		341.619.000,00		369.648.800,00		399.978.400,00		432.796.600,00		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100	100	315.714.638,00	100	341.619.000,00	100	369.648.800,00	100	399.978.400,00	100	432.796.600,00	1.06.0.00.0.00.01.000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				315.714.638,00		341.619.000,00		369.648.800,00		399.978.400,00		432.796.600,00		
Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	2	315.714.638,00	2	341.619.000,00	2	369.648.800,00	2	399.978.400,00	2	432.796.600,00		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				315.714.638,00		341.619.000,00		369.648.800,00		399.978.400,00		432.796.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	2	2	315.714.638,00	2	341.619.000,00	2	369.648.800,00	2	399.978.400,00	2	432.796.600,00		

4.4. Program Prioritas Bupati Tabalong Periode 2025-2029

Program Prioritas Bupati Tabalong Periode 2025-2029 terdiri dari Tujuh Program. Tetapi untuk Dinas Sosial Kabupaten terdapat Kegiatan yang mendukung program tersebut. Program ini terkait dengan Program Beasiswa dan Bantuan Keluarga Pendamping Pasien.

Adapun Tujuan, Sasaran, dan Manfaat dari Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Beasiswa

a. Tujuan

Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar/mahasiswa berprestasi maupun keluarga kurang mampu

b. Sasaran

- Siswa SD, SMP, SMA/SMK yang berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi
- Mahasiswa Tabalong yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi

c. Manfaat

- Membantu meringankan biaya pendidikan
- Mengurangi angka putus sekolah
- Mendorong peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) Tabalong

2. Program Bantuan Keluarga Pendamping Pasien (tabalong Sehat Keluarga).

a. Tujuan

Memberikan dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga yang mendampingi anggota keluarganya di rawat di rumah sakit.

b. Sasaran

Adapun sasarannya adalah keluarga pasien dari kalangan kurang mampu yang harus menunggu/menemani pasien di rumah sakit. Bentuk bantuannya bisa berupa bantuan akomodasi/tempat singgah/rumah singgah serta bantuan konsumsi atau kebutuhan dasar selama mendampingi pasien.

c. Manfaat

- ‘- Mengurangi beban biaya keluarga pasien
- ‘- Memberikan kenyamanan bagi keluarga pasien selama proses perawatan.
- ‘- Menunjang pelayanan yang lebih humanis

Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mendukung kedua program tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4

DAFTAR SUB. KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL				
1.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Program Indonesia Pasti Sehat (Keluarga Pendamping Pasien)
2.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Program 1000 Beasiswa
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

Jadi untuk program Beasiswa lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, sedangkan untuk Program Tabalong Sehat (Keluarga Pendamping Pasien) lebih fokus kepada aspek perlindungan sosial dan kesehatan untuk membantu masyarakat menghadapi risiko kesehatan.

4.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran Utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial. IKU menjadi dasar evaluasi apakah program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan misi pembangunan daerah khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
1	Predikat Nilai Akip		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

Pada Tabel tersebut terdapat dua indikator pokok :

1. Persentase
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana PPKS (Pemerlu Kesejahteraan Sosial, misalnya anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis yang terjangkau layanan dari Dinas Sosial. Artinya semua PPKS yang terdata harus mendapatkan layanan sosial tanpa terkecuali.

2. Persentase
 Jumlah PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur keterlibatan PSKS bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan atau program sosial. Dengan adanya indikator ini Dinas Sosial mendorong PSKS agar lebih aktif, bukan hanya pasif menerima bantuan, tetapi ikut langsung terlibat dalam kegiatan sosial, pelatihan, maupun program pemberdayaan.

Jadi manfaat IKU bagi Dinas Sosial adalah :

1. Sebagai monitoring dan evaluasi pencapaian program kesejahteraan sosial
2. Menjamin agar pelayanan sosial merata dan adil bagi masyarakat rentan
3. Menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Secara Umum Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong merupakan ukuran utama yang dipakai untuk menilai sejauhmana program/kegiatan sosial berhasil dilaksanakan sesuai target pembangunan daerah.

Hal ini terlihat pada pada tabel 4.6 berikut ini :

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										



**RENSTRA DINAS SOSIAL
2025-2029**

2.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	positif	Persen	75	78	79	80	80	85	87	

Penjelasan indikator yang terdapat pada tabel 4.6 adalah :

- a. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan, pengemis, dan masyarakat, dan masyarakat rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Adapun makna indikator tersebut adalah untuk mengukur seberapa banyak kelompok rentan dan terlantar yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui intervensi pemerintah daerah.

- b. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerima bantuan dari pemerintah pusat/daerah.

Adapun makna indikator tersebut untuk mengukur berapa persen masyarakat miskin/rentan masuk dalam data DTKD benar-benar mendapat intervensi bantuan (bansos, subsidi, dan layanan sosial lainnya).

Jadi Indikator Kinerja Kunci adalah untuk memastikan kebutuhan dasar kelompok rentan dan terlantar terpenuhi (100%) serta cakupan penerima bantuan sosial meningkat (78% - 85%), sehingga indikator ini diharapkan agar amanat SPM bidang sosial serta tujuan nasional untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial dapat terwujud.

4.7 Tantangan dan Peluang Dinas Sosial

1. Tantangan

Tantangan (*Threats*), yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi.

Secara umum tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong antara lain sebagai berikut :

1 . Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan sosial

Masih banyak masyarakat miskin, rentan miskin, serta kelompok rentan (disabilitas, lansia terlantar, gelandangan, korban bencana) yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

2. Keterbatasan anggaran dan sumber daya

Anggaran yang terbatas seringkali membuat program tidak bisa menjangkau seluruh sasaran. Jumlah SDM (Pekerja Sosial, TKSK, Pendamping PKH, dll.) juga terbatas.

3. Koordinasi Lintas Sektor

Isu sosial sering berkaitan dengan bidang lain (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja). Lemahnya koordinasi bisa menghambat keberhasilan program.

4. Perubahan sosial dan dinamika masyarakat.

Perubahan gaya hidup, urbanisasi dan teknologi memunculkan masalah baru, seperti kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, hingga penyalahgunaan narkoba.

5. Pendataan yang belum akurat.

Basis data terpadu (BDT/DTKS) masih sering dianggap belum valid, sehingga berpengaruh pada tepat sasaran bantuan sosial.

6. Kesiapsiagaan bencana

Indonesia rawan bencana, sehingga Dinas Sosial dituntut cepat tanggap dalam penyediaan logistik dan layanan darurat, namun seringkali menghadapi kendala teknis dan logistik.

2. Peluang

Peluang (*Opportunities*), yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dalam mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan untuk melakukan beberapa hal. Berikut peluang Dinas Sosial Kabupaten Tabalong :

1. Dukungan Kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya Program nasional (PKH, BPNT, JKN, KIP/ Kartu Indonesia pintar dan sebagainya) yang bisa di sinergikan dengan program daerah.
2. Pemanfaatan teknologi digital
Digitalisasi data sosial (DTKS online, aplikasi pengaduan, monitoring bantuan sosial) dapat meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran.
3. Kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.
CSR perusahaan, LSM dan Komunitas sosial bisa menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Sosial
Adanya Pendidikan dan pelatihan pekerja sosial, pendamping, serta kader kesejahteraan sosial yang bisa memperkuat layanan di lapangan.
5. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Karang Taruna, LKS, relawan sosial dan lembaga keagamaan bisa diberdayakan untuk mempercepat pencapaian tujuan.
6. Kesadaran masyarakat meningkat
Solidaritas sosial terutama pasca bencana atau masa krisis (pandemi) bisa menjadi kekuatan gotong royong dalam menyelesaikan masalah sosial

BAB V

PENUTUP

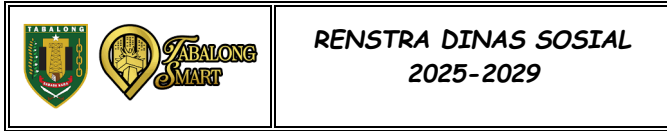
Atas berkat rahmat Allah SWT, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun 2025–2029, adalah sebagai pengatur/arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan, dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Rencana Strategis merupakan manifestasi dari respon Dinas Sosial Kabupaten Tabalong terhadap RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 serta kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta analisis lingkungan yang efektif.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tabalong ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu renstra SKPD Kabupaten Tabalong untuk pencapaian sasaran misi pertama dari RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029. Untuk tercapainya sasaran renstra dimaksud diperlukan dukungan penuh dari semua *stakeholders* terutama seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 akan dapat dicapai, dengan faktor penentu adanya dukungan pimpinan, faktor “pengungkit” serta semangat dan kerja keras yang didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawakkal terhadap Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan, tiada hari tanpa kesetiakawanan sosial dengan menunjung tinggi motto “Penduduk Miskin berkurang Bila Anda Ikut Peduli”

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, penyusunan dan penilaian upaya Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sedemikian rupa sebagai hasil pencapaiannya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.



Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dimasa 5 (lima) tahun tersebut dapat terarah dan terukur.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama oleh semua aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong,



Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199603 1 001